

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak merupakan tumpuan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak sendiri berasal dari kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dikelola Direktorat Jendral Pajak dibawah Kementerian Keuangan. Dalam UU APBN 2017, pendapatan negara telah ditetapkan sebesar Rp. 1.750,3 triliun, belanja negara Rp. 2.080,5 triliun, dan pembiayaan Rp. 330,2 triliun. Untuk tahun 2017 ini pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan yang mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak dalam APBN 2017 telah ditargetkan sebesar Rp. 1.489,9 triliun. Dari yang telah ditargetkan pemerintah dalam penerimaan pajak tersebut, tentunya bukan pekerjaan mudah bagi Direktorat Jendral Pajak untuk memenuhi target tersebut. Direktorat Jendral Pajak (DJP) tentunya harus bekerja keras agar mencapai target penerimaan ditahun 2017. Apalagi di Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, menghitung besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke nantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dengan menganut *Self Assessment System* ada beberapa Wajib Pajak kurang patuh dengan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan mengotak-atik pajak terhutang, dan ada juga yang enggan untuk membayar pajaknya sendiri

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak dalam melakukan sistem dan peraturan perpajakan yang ada. Salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan, kebijakan reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak. Kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak agar tujuan tersebut tercapai program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*.

Salah satu perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak supaya masyarakat patuh dalam membayar pajak dan melaporkan hartanya sesuai yang ada dilapangan, tentunya dengan tujuan awal untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar 85,6% atau sebesar Rp. 1.489,9 triliun dari total pendapatan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah merancang program yang lebih baik guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyetor pajak. Program tersebut yaitu *tax amnesty*. Dengan adanya program baru ini, diharapkan mampu mencapai target penerimaan pajak yang cukup besar dan akan membantu roda perekonomian Indonesia.

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak oleh pemerintah dan ditujukan untuk wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pribadi belum wajib pajak, badan yang belum wajib pajak yang ada didalam negeri maupun diluar negeri, dengan fasilitas yang menguntungkan wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Tentunya *tax amnesty* ini memberi banyak keuntungan untuk wajib pajak seperti apa yang sudah penulis jelaskan diparagraf atas. Penerapan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan antusias dan kepercayaan masyarakat untuk menyetor pajak. Selain itu dengan adanya program *tax amnesty* diharapkan juga dapat memperluas *tax base* sehingga kedepan akan mempunyai data yang lebih banyak lagi mengenai wajib pajak, dan juga dapat merepatriasi modal dari luar negeri menuju dalam negeri, yang nantinya berdampak baik bagi penerimaan yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Dari yang telah diungkapkan penulis di atas, diharapkan banyak wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dari periode 1 sampai dengan periode 3 sehingga membantu melancarkan perekonomian nasional. Melihat hal diatas maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir (TA) dengan judul “DAMPAK TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN NEGARA STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR”

1.2 Ruang Lingkup

Analisis penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematisasi penyusunan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Faktor hambatan bagi petugas pajak dalam melaksanakan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
2. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam optimalisasi *tax amnesty*
3. Penerimaan negara sebelum dan sesudah adanya program *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
4. Dampak *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berpengaruh terhadap penerimaan negara

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulisan dalam Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui hambatan bagi petugas pajak dalam pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
2. Mengetahui upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam optimalisasi *tax amnesty*
3. Mengetahui penerimaan negara sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
4. Mengetahui pengaruh program *tax amnesty* terhadap penerimaan negara

1.3.2 Kegunaan penulisan

Berikut adalah manfaat dari penulisan ini:

1. Bagi Penulis

Dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi baru tentang dampak dari *tax amnesty* terhadap penerimaan negara studi kasus di KPP Pratama Karanganyar.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

3. Bagi Instansi

Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mencapai target penerimaan negara. Serta dapat meningkatkan antusias dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas akhir untuk mendapatkan informasi yang cukup, maka diperlukan beberapa data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya baik yang dilakukan melalui proses wawancara maupun observasi yang dilakukan dengan beberapa pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar yang tugasnya berkaitan dengan *tax amnesty*.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang telah membukukan dan mempublikasikan data siap pakai. Cara memperoleh data sekunder adalah dengan:

- a. Pengambilan data dari dokumen dan arsip pada bagian yang berkaitan dengan *tax amnesty*.
- b. Pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur, dan berita nusantara yang berkaitan dengan materi laporan yaitu *tax amnesty*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai apa yang diuraikan penulis dalam Tugas Akhir. Tujuan dari sistematika adalah untuk

mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan penulis dalam Tugas Akhir. Berikut ini sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

Dalam bab ini berisi tentang Sejarah KPP Pratama Karanganyar, Visi dan Misi KPP Pratama Karanganyar, Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar, Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Karanganyar.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, pengertian *tax amnesty*, tata cara mengikuti *tax amnesty*, syarat mengikuti *tax amnesty*, periode dan tarif tebusan *tax amnesty*, keuntungan *tax amnesty*, dan dampak dari *tax amnesty* terhadap penerimaan negara yang merupakan inti dari pembahasan Tugas Akhir ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan pada bab-bab sebelumnya yang telah ditulis terlebih dahulu, dan penutup.